

Analisis Defisit Angka Kecukupan Energi (AKE) Masyarakat Sumatera Utara

¹Muhammad Fadly Abdina, ²Muhammad Alqamari, ²Reyza Suwanto Sitorus

¹Fakultas Pertanian Universitas Medan Area,

²Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: reyzasuwanto@umsu.ac.id

Abstract: *The purpose of this study was to find out how the household nutritional adequacy rate consists of an assessment of the Energy Adequacy Rate, Food is the most basic need for every living thing to meet nutritional and energy needs in order to be able to carry out daily activities. This study aims to determine the pattern of household food consumption based on quantity and quality aspects. The data collection method uses the 2 x 24 hour food recall method. The results showed that the household energy consumption in North Sumatra Province. The percentage of poor households who are very vulnerable and food insecure is comparable to poor household members who are classified as poor, namely 21.3%. Likewise, the proportion of poor households experiencing an energy deficit in Table 5 (44.6%).*

Submit:

Keyword : Food, Energy, Poor

Review:

Publish:

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana angka kecukupan pangan rumah tangga yang terdiri dari penilaian Angka kecukupan Energi (AKE), Pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan tenaga agar bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi pangan rumah tangga berdasarkan aspek kuantitas dan kualitas. Metode pengumpulan data menggunakan metode food recall 2 x 24 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi energi rumah tangga Provinsi Sumatera Utara. Persentase rumah tangga miskin sangat rawan dan rawan pangan sebanding dengan anggota rumah tangga miskin yang tergolong bergizi buruk yakni 21.3%. Demikian juga persentase rumah tangga miskin yang mengalami defisit energi pada Tabel 5 (44.6%)

Kata Kunci: Pangan , Energi , Miskin

Citation :

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

PENDAHULUAN

Pangan merupakan hak dasar setiap orang. Deklarasi universal HAM tahun 1948 pangan hak dasar setiap orang: "*....everyone has the right to a standard of living adequate for the health being of himself and his family, including for food...*" yang kemudian disempurnakan dengan menekankan hak untuk bebas dari kelaparan : "*....the right of everyone to be free from hunger....*"

Berbagai keputusan politik untuk menghilangkan kemiskinan dan defisit AKE dari muka bumi Dara pemimpin dunia. Rome Declaration pada World Food Summit tahun 1996 menyepakati: "*... to eradicate hunger in all countries ... reducing number of undernourished people to half their present level no later than 2015* (FAO, 2002).

Lima tahun setelah Deklarasi Roma, tahun 2001 FAO kembali menyelenggarakan World Food Summit : *five year later* untuk mengkaji hambatan dalam pencapaian sasaran, serta menggalang komitmen politik dan dukungan dana. WFS:fyI menghasilkan deklarasi *International Alliance Against* mempertegas kembali komitmen: (a) ketahanan pangan bagi tiap orang, (b) hak setiap mengakses pangan yang aman dan bergizi, dan (c) dukungan internasional dalam pengentasan sebagai penyebab utama kelaparan. Sasaran KTT, jumlah penduduk bumi yang menderita kelaparan dan kurang gizi harus berkurang sebanyak 24 juta setiap tahunnya, atau sekitar 600 ribu jiwa untuk Indonesia, hingga tahun 2015, (FAO, 2002).

Untuk mencapai sasaran tersebut pemerintah Indonesia diantaranya mengembangkan konsepbatasan yang tegas tentang defisit AKE, yang akan digunakan dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program penanggulangan defisit AKE. Berbagai program penanggulangan defisit AKE dilaksanakan, baik langsung maupun tidak langsung, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak-anak, pemberian bantuan makanan untuk balita gizi buruk, beras untuk rakyat miskin (raskin), pemberian bantuan untuk korban bencana alam, operasi pasar kebutuhan pokok (OP), jaring pengaman sosial (JPS), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan (BOS), pengembangan desa mandiri pangan (Demapan), pemberdayaan daerah rawan pangan (PDRP), dan berbagai skim kredit untuk usaha kecil, dan menengah (UKM).

Defisit AKE berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat : (a) tingkat kematian bayi tinggi, (b) rentan terhadap penyakit: lebih 2 juta anak meninggal setiap tahun karena dehidrasi diare, (c) gangguan pertumbuhan dan kepandaian : diperkirakan 26 juta anak tumbuh pendek (*stunted*) dari yang berbubungan positif dengan rendahnya IQ, (d) pengeluaran masyarakat untuk kesehatan meningkat; serta (e) menghambat pertumbuhan ekonomi: hampir 67 juta anak kurang gizi akibat kelaparan kronis tidak dapat menyelesaikan sekolahnya. Hal ini akan menyebabkan kurangnya keterampilan dan produktivitas yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi (Oison, 1999; FAO,2004).

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Rose (1999) mencatat beberapa penyebab utama defisit AKE yaitu meningkatnya harga-harga pendapatan riil, tingginya tingkat pengangguran dan terbatasnya subsidi pangan. orkan bahwa kemiskinan, instabilitas pemerintahan, eksploitasi lingkungan, ketidakberdayaan pada anak-anak, wanita dan lansia umumnya merupakan penyebab kelaparan.

Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara (PSU) pada tahun 2015 adalah 13.937.797 jiwa. nduduk terus meningkat sejak tahun 1990. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2000 adalah 1.20% per tahun, periode 2009 - 2015 adalah 1.67% per tahun, dan adalah 1.82% per tahun.

Penyebaran penduduk PSU tidak merata. Pada tahun 2015, sebagian besar (9.83 juta jiwa; 70,5% di Kota Medan, Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Padang Sidempuan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Langkat dan Simalungun. Selanjutnya, 6.98 juta jiwa (50.11%) penduduk tinggal di pedesaan, dan sisanya 6.95 juta jiwa (49.89%) di perkotaan.

Data jumlah penduduk miskin di atas menunjukkan bahwa walaupun menurun namun tetap memiliki potensi defisit AKE di PSU relatif tinggi dan perlu diwaspadai karena mempakani indikasi kerawanan pangan. Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebaran dan tingkat kelaparan serta status gizi penduduk miskin PSU. Adapun alasan penduduk miskin yang menjadi sasaran survey ini adalah karena merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap defisit AKE. Batasan mayarakat miskin dalam survey ini adalah rumah tangga penerima BLT/Raskin.

METODE

Penduduk PSU yang tergolong miskin pada tahun 2009 adalah 1.474.260 jiwa (11.13 % dari 13.248.386 jiwa penduduk PSU). Jumlah keluarga keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera-1) di PSU pada tahun 2009 adalah 335.751 keluarga (11.09 % dari 3.027.500 keluarga penduduk PSU). Keluarga miskin tersebar di seluruh kabupaten/kota yakni 5.79 % di Nias (termasuk Nias Utara, Nias Barat dan Gunung Sitoli), 4.02% di Mandailing Natal, 2.29% di Tapanuli Selatan, 3.53% di Tapanuli Tengah, 2.45% di Tapanuli Utara, 1.28% di Toba Samosir, 6.92% di Labuhan Batu (termasuk Labuhan Batu Selatan dan Labuhan Batu Utara), 5.70% di Asahan, 7.91% di Simalungun, 1.91% di Dairi, 3.25% di Karo, 6.01% di Deli Serdang, 9.46% di Langkat, 3.41% di Nias Selatan, 1.23% di Humbang Hasundutan, 0.35% di Pakpak Bharat, 1.64% di Samosir, 4.21% di Serdang Bedagai, 3.31% di Batubara, 1.61% di jwas Utara, 1.49% di Padang Lawas, 0.97% di Kota Sibolga, 1.76% di Tanjung Balai, 2.04% di Pematang Siantar, 1.41% di Tebing Tinggi, 13.45% di Medan, 1.25% di Binjai, 1.35% di Padang Sidempuan.

Survai dilakukan pada 268 keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera-1) yang secara proporsional meliputi seluruh kabupaten/kota PSU yakni

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

31 keluarga di Nias, 53 keluarga di Mandailing Natal, 40 keluarga di Tapanuli Selatan, 51 keluarga di Tapanuli Tengah, 29 keluarga di Tapanuli utara, 23 keluarga di Toba Samosir, 31 keluarga di Labuhan Batu, 80 keluarga di Asahan, 92 keluarga di Simalungun, 39 keluarga di Dairi, 45 keluarga di Karo, 94 keluarga di Deli Serdang, 119 keluarga di Langkat, 40 keluarga di Nias Selatan, 22 keluarga di Humbang Hasundutan, 8 keluarga di Pakpak Barat, 22 keluarga di Samosir, 62 keluarga di Serdang Bedagai, 43 keluarga di Batubara, 19 keluarga di Padang Lawas Utara, 20 keluarga di Padang Lawas, 10 keluarga di Labuhan Batu Selatan, 25 keluarga di Labuhan Batu Utara, 14 keluarga di Nias Utara, 16 keluarga di Nias Barat, 6 keluarga di Kota Sibolga, 15 keluarga di Tanjung Balai, 17 keluarga di Pematang Siantar, 7 keluarga di Tebing Tinggi, 125 keluarga di Medan, 11 keluarga di Binjai, 13 keluarga di Padang Sidempuan, dan 10 keluarga Gunung Sitoli.

Survei dilakukan pada 140 kecamatan meliputi seluruh kabupaten dan kota, dipilih purposif yakni yang jumlah rumah tangga penerima BLT/raskin paling banyak pada tahun 2009. Jumlah kecamatan yang disurvei pada setiap kabupaten/kota adalah 3 kecamatan di Kabupaten Nias, 5 kecamatan di Tapanuli Selatan, 8 kecamatan di Tapanuli Tengah, 6 kecamatan di Tapanuli Utara, 4 kecamatan di Toba Samosir, 5 kecamatan di Labuhan Batu, 5 kecamatan di Asahan, 6 kecamatan di Simalungun, 6 kecamatan di Dairi, 7 kecamatan di Karo, 5 kecamatan di Deli Serdang, 9 Kecamatan di Langkat, 5 kecamatan di Humbang Hasundutan, 3 kecamatan di Pakpak Bharat, 4 kecamatan di Samosir, 7 kecamatan di Serdang Bedagai, 1 kecamatan di Padang Lawas Utara, 4 kecamatan di Labuhan Batu Utara, 3 kecamatan di Nias Utara, 3 kecamatan di Nias Barat, 3 kecamatan di Tanjung Balai, 2 kecamatan di Tebing Tinggi, 3 kecamatan di Binjai, 3 kecamatan di Padang Sidempuan 3.

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan meliputi :

- Demografi dan sosial ekonomi rumah tangga : nama, umur, jenis kelamin, status dalam rumah tangga, pendidikan, pekerjaan utama, pekerjaan utama, dan pendapatan keluarga perbulan.
- Data antropometrik setiap anggota rumah tangga: berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas bagi wanita usia subur.
- Konsumsi pangan utama rumah tangga selama 2 hari : Konsumsi pangan keluarga selama 1 minggu f Data kuantitatif kelaparan

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dengan kepala keluarga (Kelompok data a, c, d, e) dan seluruh anggota rumah tangga responden (kelompok data a, b, dan e). Data antropometrik anggota rumah tangga responden diukur oleh enumerator pada saat wawancara (berat badan

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

ditimbang dengan *mechanical personal scale*, tinggi badan diukur dengan meter). Lebih detail, data primer yang dikumpulkan dirangkum dalam Kuesioner Instrumen Survei Pemantauan Masyarakat yang Mengalami Kelaparan Tahun 2016 pada Lampiran 7. Kuesioner ini telah pernah dipergunakan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara untuk pemantauan kelaparan di Sumatera Utara tahun 2016 (BKP SU, 2016).

Rumah tangga responden pada survey ini sebanyak 334 rumah tangga miskin (penerima BLT atau dan raskin), masing-masing sesuai daftar pada setiap kecamatan lokasi survey (Tabel 3.1). Rumah tangga responden dipilih secara acak dari *sampling frame* rumah tangga miskin pada setiap kecamatan lokasi survei.

Data sekunder yang dikumpulkan adalah data demografi, sosial ekonomi dan pertanian, Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Utara. Data lainnya yang terkait dengan studi ini juga dikumpulkan. Data-data sekunder dikumpulkan dari instansi-instansi terkait.

Data yang terkumpul ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Variabel pengolahan data adalah :

- a. Keadaan umum Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Utara, meliputi geografi, luas wilayah, demografi, sosial ekonomi, dan pertanian
- b. Demografi dan sosial ekonomi rumah tangga responden pada setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Utara
- c. Rataan konsumsi harian energi oleh setiap anggota rumah tangga responden (KHEId). Indikator ini diperoleh dari total rata-rata konsumsi harian energi rumah tangga (KHERT) yang diperoleh berdasarkan hasil *recall* 2 hari dan 1 Minggu. KHEId adalah KHERT dibagi jumlah anggota rumah tangga.
- d. Tingkat konsumsi energi (TKE) yakni perbandingan antara konsumsi harian energi setiap anggota rumah tangga responden dengan kebutuhan rata-rata energi per kapita yakni 2.200 kalori per hari. (*Catatan* : menurut WKPG tahun 2015 kebutuhan rata-rata energi per kapita per hari adalah 2.200 kalori). $TKE (\%) = 100 \times KHEId / 2200$. Penilaian status kelaparan berdasarkan TKE adalah : lapar bila $TKE < 70\%$, rawan pangan bila $TKE 70 - 80 \%$, dan tahan pangan bila $TKE > 80\%$.
- e. Jumlah dan penyebaran penduduk lapar, rawan pangan, dan tahan pangan pada setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Utara.

Deskripsi hasil pengamatan kualitatif kelaparan pada setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Utara. Hasil pengukuran atas tiga kategori yaitu tahan pangan, rawan pangan dan neiparan. Rumah tangga dikategorikan tahan pangan apabila rumah tangga tersebut tidak mengalami gangguan pada kebiasaan frekuensi dan porsi makan sebagai akibat dari

ketidakmampuan menyediakan pangan. Rumah tangga dikategorikan rawan pangan apabila pernah mengalami gangguan pada kebiasaan frekuensi dan porsi makanan seperti adanya frekuensi maupun porsi makan pada anggota rumah tangga dewasa, karena masalah daya beli dan atau ketersediaan pangan. Rumah tangga dikatakan lapar apabila terjadi penumman porsi makan anggota rumah tangga dewasa disertai perasaan tidak nyaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jumlah Dan Sebaran Penduduk Miskin

Kemiskinan memiliki peran yang menonjol sebagai penyebab masalah gizi. Banyak ahli melaporkan kemiskinan mengakibatkan kualitas intake zat gizi menjadi rendah yang pada akhirnya menimbulkan status gizi rendah. Kemiskinan ditandai oleh produktivitas yang rendah, pendapatan rendah, dan konsumsi pangan rendah baik kualitas maupun kuantitas.

Sebagian besar (50.11%) penduduk PSU tinggal di pedesaan, dan sisanya (49.89%) di perkotaan. Jumlah penduduk miskin mengalami turun naik. Penduduk miskin pada tahun 1993 sebanyak 1.13 juta orang (12.31% penduduk PSU), turun menjadi 1.23 juta orang (10.92% penduduk PSU) pada tahun 1996. Akibat krisis moneter, jumlah penduduk miskin tahun 1999 meningkat menjadi 1.97 juta orang (16.74%). Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin turun menjadi 1.80 juta jiwa (14.28%) pada tahun 2004. Namun kenaikan harga BBM pada Maret dan Oktober 2005 berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 1.98 juta jiwa (15.66%) pada tahun 2006. Selanjutnya, penduduk miskin terus berkurang dan menjadi 1.47 juta jiwa (11.51 %) pada tahun 2009 dan 1.36 juta jiwa (9.76%) tahun 2014.

Sebaran penduduk dan penduduk miskin di kabupaten/kota dan PSU pada tahun 2014 tercantum pada Tabel 1. Sebanyak 1.363.537 jiwa (9.76% dari penduduk PSU) tergolong miskin. Tampak bahwa penyebaran penduduk miskin PSU tidak merata di semua kabupaten/kota, sebagian besar (53.21%) berada hanya di 9 kabupaten/kota yakni Medan, Langkat, Asahan, Labuhan Batu, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Nias dan Nias Selatan, dan sisanya (45.79%) di 24 kabupaten/kota lainnya. Pada ketujuh kabupaten/kota tersebut, terdapat lebih dari 4.3% penduduk miskin PSU. Akan tetapi karena variasi jumlah penduduk kabupaten/kota, persentase penduduk miskin pada setiap kabupaten/kota tidak paralel dengan sebaran penduduk miskin Sumatera Utara.

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Serta Sebarannya tahun 2011-2014

No.		Jumlah (000 jiwa)	Persentase (%)	Sebaran
-----	--	-------------------	----------------	---------

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

	Kabupaten/ Kota	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	
1.	Nias	25,39	24,99	23,28	22,21	19,11	18,67	17,28	16,39	6.71
2.	Mandailing Natal	49,05	48,39	40,69	39,68	11,98	11,58	9,62	9,28	3.75
3.	Tapanuli Selatan	30,39	29,91	30,77	29,38	11,40	11,10	11,33	10,74	2.25
4.	Tapanuli Tengah	50,21	49,61	52,00	49,86	15,96	15,03	15,41	14,47	3.87
5.	Tapanuli Utara	33,57	33,09	33,75	32,23	11,89	11,55	11,68	11,06	2.38
6.	Toba Samosir	16,93	16,64	16,96	16,51	9,67	9,43	9,54	9,23	1.18
7.	Labuhanbatu	42,61	42,08	38,14	37,35	10,15	9,61	8,53	8,20	6.92
8.	Asahan	73,39	72,32	80,54	76,97	10,85	10,52	11,60	10,98	5.67
9.	Simalungun	84,35	83,09	87,72	86,25	10,21	9,97	10,45	10,20	7.29
10.	Dairi	25,87	25,49	24,00	23,35	9,48	9,28	8,68	8,40	1.84
11.	Karo	37,22	36,71	36,93	35,36	10,49	9,93	9,79	9,20	2.84
12.	Deli Serdang	92,33	91,19	91,97	90,92	5,10	4,78	4,71	4,56	6.20
13.	Langkat	100,80	99,27	104,31	100,63	10,31	10,02	10,44	9,99	9.03
14.	Nias Selatan	57,80	56,94	56,96	54,46	19,71	19,05	18,83	17,81	4.06
15.	Humbang H.	17,50	17,25	17,94	17,14	10,09	9,73	10,00	9,44	1.20
16.	Pakpak Bharat	5,39	5,32	4,94	4,72	13,16	12,40	11,28	10,55	0.40
17.	Samosir	18,95	18,48	17,18	16,27	15,67	15,17	14,01	13,20	1.55
18.	Serdang Bedagai	60,50	59,53	56,55	54,48	10,07	9,89	9,35	8,98	4.10
19.	Batu Bara	44,34	43,66	46,86	44,72	11,67	11,24	11,92	11,25	3.36
20.	Padang Lawas Utara	24,04	23,72	25,01	23,86	10,64	9,98	10,28	9,60	1.54
21.	Padang Lawas	24,04	23,64	21,23	20,34	10,56	9,80	8,59	8,03	1.49

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

22.	Labuhanbatu Selatan	41,74	41,21	37,33	35.65	14,86	13,96	12,36	11.54	*
23.	Labuhanbatu Utara	39,34	38,68	39,09	37.30	11,77	11,34	11,34	10.71	*
24.	Nias Utara	39,15	38,51	40,78	38.95	30,44	29,50	30,94	29.28	*
25.	Nias Barat	24,24	23,84	24,88	23.76	29,32	28,57	29,65	28.10	*
26.	Sibolga	11,25	11,13	11,08	10.57	13,18	13,00	12,90	12.26	1.02
27.	Tanjungbalai	24,24	23,86	24,20	23.17	15,52	14,86	14,85	14.02	1.92
28.	Pematangsiantar	26,45	26,01	26,61	25.43	11,15	10,79	10,93	10.35	1.98
29.	Tebing Tinggi	18,27	18,02	17,98	17.20	12,44	11,93	11,74	11.08	1.39
30.	Medan	204,1	201,06	209,69	200.32	9,63	9,33	9,64	9.12	13.59
31.	Binjai	17,41	17,16	17,48	16.72	7,00	6,72	6,75	6.38	1.21
32.	Padangsidi mpuan	19,52	19,24	18,44	17.65	10,08	9,60	9,04	8.52	1.26
33.	Gunungsitoli	40,97	40,40	41,10	37.20	32,12	30,85	30,94	27.63	1.34

Sumber: BPS PSU

Persentase penduduk miskin di Nias, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Samosir, Pakpak Bharat, Simalungun, Asahan, Batubara, Sibolga, Pematang Siantar dan Tanjung Balai lebih dari 10%. Keadaan sebaliknya di Toba Samosir, Dairi, Labuhan Batu, Labuhan, Padang Sidempuan, Medan, Serdang Bedagai, Binjai, dan Deli Serdang, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Humbang Hasundutan, Langkat, Karo, Mandailing Natal dengan penduduk miskinnya kurang dari 10%. Walaupun angka kemiskinan menurun sejak 2009 dan ditahun 2014 angka kemiskinan sebesar 9.76% dari populasi penduduk namun terdapat wilayah yang memiliki resiko penduduk miskin dengan nilai 27.63% yaitu Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya data pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin kabupater/kota erat kaitannya dengan jenis sektor ekonomi yang dominan. Persentase penduduk miskin lebih tinggi di kabupaten/kota yang perekonomiannya lebih didominasi sektor pertanian seperti Nias Selatan, Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Karo, Simalungun,

Labuhan Batu, Asahan dan Langkat. Sebaliknya persentase penduduk miskin lebih rendah di daerah yang perekonomiannya lebih dominan dipengaruhi sektor industri, perdagangan, dan jasa seperti Deli Serdang, Serdang Bedagai, Padang Sidempuan, Sibolga, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Binjai, dan Medan. Hal ini antara lain disebabkan (i) nilai ekonomi sektor pertanian lebih rendah dibandingkan dengan sektor industri, perdagangan, maupun jasa, serat (ii) jenis dan jumlah lapangan kerja yang tersedia di kabupater/kota yang perekonomiannya didominasi sektor pertanian lebih terbatas dibandingkan dengan kabupater/kota yang perekonomiannya didominasi sektor industri, perdagangan, atau dan jasa.

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kantong-kantong kemiskinan di PSU umumnya terdapat di kabupaten/kota yang perekonomiannya dominan digerakkan sektor pertanian yaitu Nias Selatan, Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hanundutan, Toba Samosir, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat Karo, Simalungun, Labuhan Batu, Asahan dan Langkat. Jumlah penduduk keenam belas kabupaten ini pada tahun 2014 hanya 53.71% dan jumlah 7.485.991 jiwa, tetapi jumlah penduduk miskinnya 59.20% dari jumlah penduduk miskin PSU atau 805.120 jiwa.

Salah satu penyebab utama masalah gizi buruk dan atau gizi kurang adalah kemiskinan. Maka salah satu program penting pengembangan kesehatan masyarakat (*community health development*) Sumatera Utara adalah pemberdayaan ekonomi petani secara sungguh-sungguh.

B. SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DAN PENDUDUK MISKIN

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, subyek survai ini adalah rumah tangga miskin yakni rumah tangga penerima Raskin dan atau BLT. Berdasarkan survai pada 284 rumah tangga miskin diperoleh gambaran tentang sosial ekonomi meliputi ukuran rumah tangga, sebaran umur penduduk, jenis kelamin penduduk, pendidikan penduduk, pekerjaan penduduk, sebaran umur kepala rumah tangga, rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, pekerjaan kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga yang digolongkan sebagai miskin. Data-data dasar rumah tangga miskin ini tercantum pada Lampiran 8 dan Lampiran 9.

1 Ukuran Rumah Tangga

Rumah tangga adalah sejumlah orang yang tinggal bersama dalam satu rumah dan makan dari satu dapur. Dengan demikian kebutuhan pangan rumah tangga dipengaruhi oleh ukurannya. Semakin besar ukuran rumah tangga semakin besar pula beban yang dipikul kepala keluarga untuk menafkahi kebutuhan pangan anggota rumah tangga.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Pada survai ini ukuran rumah tangga digolongkan atas kecil (1-4 jiwa per rumah tangga), sedang (5- 6 jiwa per rumah tangga), dan *besar* (> 6 jiwa per rumah tangga). Seseorang digolongkan sebagai anggota rumah tangga bila sudah atau akan tinggal bersama dalam satu rumah dan makan dari satu dapur sekurangnya enam bulan. Pada umumnya anggota suatu rumah tangga adalah suami, istri dan anak. Pada beberapa rumah tangga ditemukan orang tua, adik, atau cucu sebagai anggota rumah tangga.

Data hasil survai menunjukkan ukuran rumah tangga miskin di Sumatera Utara bervariasi dari 1 hingga 11 jiwa rumah tangga, jumlah anggota seluruh rumah tangga miskin yang disurvei adalah 1260 jiwa Lampiran 8. Pada Tabel 2 tertera rata-rata ukuran rumah tangga miskin serta sebarannya menurut ukuran kecil, sedang, dan besar pada setiap kabupaten/kota dan Sumatera Utara tahun 2016.

Tabel 2. Ukuran Rumah Tangga Miskin dan Sebarannya hubungkan dengan AKE setiap tabel

No.	Kabupaten/Kota	Sebaran RT Menurut Ukuran Kecil, Sedang Dan Besar (%)			Rata-Rata (Jiwa/RT)
		1-4 (Kecil)	5-6 (Sedang)	>6 (Besar)	
1.	Asahan	100.00	0.00	0.00	3.20
2.	Dairi	88.57	8.57	2.86	3.20
3.	Deli Serdang	100.00	0.00	0.00	2.60
4.	Humbang Hasundutan	45.83	37.50	16.67	4.92
5.	Langkat	65.45	30.91	3.64	4.04
6.	Nias	78.95	21.05	0.00	3.84
7.	Nias Barat	85.19	11.11	3.70	2.59
8.	Nias Utara	82.76	17.24	0.00	3.48
9.	Pakpak Bharat	100.00	0.00	0.00	2.31
10.	Serdang Bedagai	88.46	11.54	0.00	2.92
11.	Simalungun	100.00	0.00	0.00	3.40
12.	Tanjung Balai	83.33	16.67	0.00	2.00
13.	Toba Samosir	100.00	0.00	0.00	2.50
14.	Labuhanbatu	100.00	0.00	0.00	3.20
15.	Labuhanbatu Selatan	100.00	0.00	0.00	2.20

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

16.	Padang Sidempuan	60.00	20.00	20.00	4.80
17.	Tebing Tinggi	100.00	0.00	0.00	2.40
18.	Tapanuli Tengah	40.00	60.00	0.00	4.20
19.	Labuhanbatu Utara	40.00	60.00	0.00	4.40
20.	Binjai	80.00	20.00	0.00	2.40
21.	Karo	100.00	0.00	0.00	2.00
22.	Padanglawas Utara	20.00	40.00	40.00	5.80
23.	Tapanuli Utara	80.00	20.00	0.00	3.80
	Sumatera Utara	78.7	18.0	3.3	3.44

Sumber: BPS PSU

Ukuran rumah tangga miskin di Sumatera Utara rata-rata 4.5 jiwa per rumah tangga. Sebagian besar rumah tangga miskin berukuran kecil (78.7%), sisanya 18.0% berukuran sedang, dan 3.3% berukuran besar. Rumah tangga miskin ini tersebar di seluruh kabupaten/kota sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.

Selanjutnya, rata-rata ukuran rumah tangga miskin antar kabupaten/kota bervariasi dari yang terkecil yaitu rata-rata 1.92 dan 2.30 jiwa per rumah tangga di Tanjung Balai dan Pakpak Bharat hingga yang tertinggi yaitu rata-rata 4.9 dan 4.03 jiwa per rumah tangga di Langkat, Humbang Hasundutan dan Padang Sidempuan.

Rumah tangga-rumah tangga miskin di Kabupaten Simalungun, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Nias Utara, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Karo dan Medan sebagian besar berukuran kecil. Sebaliknya, rumah tangga miskin di Dairi dan Toba Samosir sebagian besar berukuran besar. Rumah tangga miskin berukuran besar tergolong sedikit di Langkat, Nias Barat, Padanglawas Utara dan Padang Sidempuan. Selanjutnya, di Toba Samosir, Tapanuli Tengah dan Labuhanbatu Utara sebagian besar rumah tangga miskin berukuran sedang.

2. Pendidikan

Pendidikan diukur menurut lama pendidikan formal yang ditempuh (tidak termasuk tidak naik kelas) dan dikelompokkan atas *tidak bersekolah* (lama pendidikan 0 tahun), *pendidikan dasar* (lama 1 - 6 tahun), *pendidikan menengah* (lama pendidikan 7-9 tahun), *pendidikan atas* (lama 10-12 tahun), dan perguruan tinggi (lama pendidikan > 13 tahun). Data lama pendidikan miskin tertera pada Lampiran 8.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Rata-rata lama pendidikan penduduk miskin serta sebarannya menurut kelompok lama pendidikan pada kabupaten/kota dan Sumatera Utara tertera pada Tabel 4.5. Sebagian besar penduduk miskin di Sumatera Utara berpendidikan 1 - 6 tahun atau sekolah dasar (36.5%), 7 - 9 tahun atau sekolah dasar (19.8%), sisanya 16.6% tidak atau belum bersekolah, 24.7% berpendidikan menengah dan 2.3% berpendidikan >12 tahun. Gambaran yang relatif sama terdapat disemua kabupaten/kota, kecuali Asahan, Humbang Hasundutan, Langkat, Tanjung Balai dan Toba Samosir Pendidikan penduduk miskin di lima kabupaten ini cukup baik yakni sebagian besar (\pm 53%) berpendidikan 7 tahun atau lebih.

Pendidikan penduduk miskin yang lebih rendah terjadi di Nias Selatan, Nias, Nias Barat, Nias, Tanjung Balai, Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat dan Dairi. Lebih dari 75% penduduk miskin kabupaten/kota ini berpendidikan 6 tahun atau kurang atau tidak bersekolah.

Secara umum lama pendidikan penduduk miskin Sumatera Utara tahun 2016 tergolong mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 5.4 tahun menjadi 7.1 tahun ditahun 2016. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata lama pendidikan penduduk Sumatera Utara tahun 2015 yakni rata-rata 8.6 tahun. Demikian juga pada sebagian besar kabupaten/kota, rata-rata lama pendidikan penduduk miskin kurang dari 6 tahun, lebih rendah dari rata-rata lama pendidikan penduduk masing-masing kabupaten/kota tersebut maupun penduduk Sumatera Utara 2015, kecuali Asahan, Langkat, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Padang Sidempuan, Padanglawas Utara, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Dairi dan Toba Samosir (berkisar 7.0 -11.1 tahun), tetapi masih lebih rendah dari rata-rata lama pendidikan PSU tahun 2015.

Tabel 3. Sebaran Penduduk Miskin Menurut Lama Pendidikan Tahun 2016

No.	Kabupaten/Kota	Sebaran Penduduk Miskin Menurut Kelompok Lama Pendidikan (%)					Rata-rata (tahun)
		0	1-6	7-9	10-12	>12	
1.	Asahan	5.00	30.00	0.00	65.00	0.00	9.60
2.	Dairi	17.65	35.29	35.29	11.76	0.00	6.71
3.	Deli Serdang	16.77	31.06	19.88	27.33	4.97	7.73
4.	Humbang Hasundutan	12.50	37.50	33.33	16.67	0.00	7.25
5.	Langkat	13.04	32.61	31.88	22.46	0.00	7.47
6.	Nias	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	10.50

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

7.	Nias Barat	5.00	70.00	20.00	5.00	0.00	6.60
8.	Nias Utara	6.67	46.67	6.67	40.00	0.00	8.20
9.	Pakpak Bharat	9.09	27.27	22.73	40.91	0.00	8.41
10.	Serdang Bedagai	8.70	33.04	22.61	33.91	1.74	8.37
11.	Simalungun	29.29	43.43	9.60	15.15	2.53	5.69
12.	Tanjung Balai	33.62	37.93	10.34	18.10	0.00	5.38
13.	Toba Samosir	19.31	48.97	17.24	13.79	0.69	5.38
14.	Labuhanbatu	17.24	24.14	10.34	48.28	0.00	8.17
15.	Labuhanbatu Selatan	0.00	47.06	50.00	2.94	0.00	7.68
16.	Padang Sidempuan	16.67	35.71	30.95	16.67	0.00	6.93
17.	Tebing Tinggi	10.68	41.75	23.30	22.33	1.94	7.54
18.	Tapanuli Tengah	8.33	41.67	8.33	41.67	0.00	7.17
19.	Labuhanbatu Utara	26.83	7.32	4.88	31.71	29.27	9.27
20.	Binjai	20.00	48.00	24.00	8.00	0.00	6.00
21.	Karo	12.50	33.33	16.67	37.50	0.00	7.79
22.	Padanglawas Utara	0.00	18.75	12.50	56.25	12.50	10.88
23.	Tapanuli Utara	0.00	0.00	31.25	68.75	0.00	11.06
Sumatera Utara		16.64	36.48	19.84	24.73	2.31	7.19

Pendidikan merupakan proses transfer IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi). Iptek bermanfaat membuat manusia lebih berdaya mengatasi aneka ragam masalah hidup. Masalah merupakan bagian dari kehidupan manusia sebab ia hidup dalam dimensi ruang dan waktu yang senantiasa berubah. Dengan ilmu pengetahuan masalah dapat dirumuskan. Dengan teknologi masalah masalah dapat diselesaikan.

Pendidikan yang rendah jamak pada penduduk miskin. Hal ini terutama disebabkan ketidakmampuan ekonomi membiayai pendidikan formal yang bagi rumah tangga miskin merupakan barang mewah.

Salah satu variabel kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah berujung pada produktivitas yang rendah. Produktivitas

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

yang rendah berujung pada kemiskinan. Pendidikan yang rendah akan mengurangi peluang dan aksesibilitas memanfaatkan berbagai kesempatan (*opportunities*).

Kemiskinan menjadi struktural. Karenanya kemiskinan mustahil dientaskan penguasaan iptek rendah, Program wajib belajar 9 tahun, program bebas uang sekolah, program beasiswa, program buku murah, program perpustakaan keliling, berbagai program pelatihan dan penyuluhan serta berbagai program lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan baik oleh pemerintah, institusi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun perorangan telah dilakukan dengan tujuan memperoleh

Pendidikan merupakan proses transfer IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi). Iptek bermanfaat membuat manusia lebih berdaya mengatasi aneka ragam masalah hidup. Masalah merupakan bagian dari kehidupan manusia sebab ia hidup dalam dimensi ruang dan waktu yang senantiasa berubah. Dengan ilmu pengetahuan masalah dapat dirumuskan. Dengan teknologi masalah masalah dapat diselesaikan.

Pendidikan yang rendah jamak pada penduduk miskin. Hal ini terutama disebabkan ketidakmampuan ekonomi membiayai pendidikan formal yang bagi rumah tangga miskin merupakan barang mewah.

Salah satu variabel kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah berujung pada produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah berujung pada kemiskinan. Pendidikan yang rendah akan mengurangi peluang dan aksesibilitas memanfaatkan berbagai kesempatan (*opportunities*).

Kemiskinan menjadi struktural. Karenanya kemiskinan mustahil dientaskan penguasaan iptek rendah, Program wajib belajar 9 tahun, program bebas uang sekolah, program beasiswa, program buku murah, program perpustakaan keliling, berbagai program pelatihan dan penyuluhan serta berbagai program lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan baik oleh pemerintah, institusi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun perorangan telah dilakukan dengan tujuan memperoleh.

Tabel 4. Rentang dan Rataan Tingkat Konsumsi Energi dan Angka Kecukupan Energi Anggota Rumah Tangga Miskin Tahun 2016

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Konsumsi Energi Anggota Rumah Tangga Miskin (kal)	Angka Kecukupan Energi (%)
-----	----------------	---	----------------------------

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

		Terendah	Tertinggi	Rataan	Terendah	Tertinggi	Rataan
1	Asahan	1695	3484	2250	77.0	158.4	102.3
2	Dairi	1441	2997	2099	65.5	136.2	95.4
3	Deli Serdang	1610	2254	1928	73.2	102.5	87.6
4	Humbang Hasundutan	1479	2531	1836	67.2	115.0	83.5
5	Langkat	1346	2999	1878	61.2	136.3	85.3
6	Nias	1346	2770	1949	61.2	125.9	88.6
7	Nias Barat	1515	2726	1908	68.9	123.9	86.7
8	Nias Utara	1448	2724	1968	65.8	123.8	89.5
9	Pakpak Bharat	1480	3081	2137	67.3	140.0	97.2
10	Serdang Bedagai	1366	3094	1929	62.1	140.7	87.7
11	Simalungun	1476	2546	2003	67.1	115.7	91.1
12	Tanjung Balai	1581	2777	1953	71.9	126.2	88.8
13	Toba Samosir	1492	2873	2057	67.8	130.6	93.5
14	Labuhanbatu	1650	2376	1911	75.0	108.0	86.8
15	Labuhanbatu Selatan	1803	2120	1975	82.0	96.4	89.8
16	Padang Sidempuan	795	2965	1842	36.2	134.8	83.7
17	Tebing Tinggi	1376	3255	2015	62.6	148.0	91.6
18	Tapanuli Tengah	927	3596	1844	42.1	163.5	83.8
19	Labuhanbatu Utara	1650	2311	1836	75.0	105.0	83.5
20	Binjai	1318	7628	4212	59.9	346.7	191.5
21	Karo	1519	4513	2714	69.0	205.1	123.4
22	Padanglawas Utara	1099	3689	1765	49.9	167.7	80.2
23	Tapanuli Utara	927	3038	1929	42.1	138.1	87.7

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

	Sumatera Utara	795	7628	1998	36.2	346.7	90.8
--	----------------	-----	------	------	------	-------	------

Keterangan : *Kebutuhan Kalori per Kapita per Hari adalah 2200 kalori*

Tabel 5. Sebaran Rumah Tangga Miskin Tahun 2016 Menurut Angka Kecukupan Energi

No.	Kabupaten/Kota	Sebaran RTM menurut Angka Kecukupan Energi (%)				
		<70%	70-79%	80-89%	90-119%	≥ 120%
1	Asahan	0.0	0.0	40.0	20.0	40.0
2	Dairi	0.0	14.3	22.9	31.4	31.4
3	Deli Serdang	0.0	0.0	20.0	80.0	0.0
4	Humbang Hasundutan	0.0	25.0	20.8	45.8	8.3
5	Langkat	3.6	25.5	32.7	25.5	12.7
6	Nias	2.6	18.4	18.4	39.5	21.1
7	Nias Barat	0.0	22.2	29.6	25.9	22.2
8	Nias Utara	0.0	10.3	24.1	51.7	13.8
9	Pakpak Bharat	0.0	15.4	23.1	23.1	38.5
10	Serdang Bedagai	3.8	26.9	19.2	30.8	19.2
11	Simalungun	0.0	20.0	0.0	60.0	20.0
12	Tanjung Balai	0.0	0.0	50.0	33.3	16.7
13	Toba Samosir	0.0	12.5	31.3	25.0	31.3
14	Labuhanbatu	0.0	0.0	40.0	60.0	0.0
15	Labuhanbatu Selatan	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
16	Padang Sidempuan	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
17	Tebing Tinggi	20.0	0.0	40.0	20.0	20.0
18	Tapanuli Tengah	40.0	20.0	0.0	20.0	20.0

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

19	Labuhanbatu Utara	0.0	0.0	60.0	40.0	0.0
20	Binjai	20.0	0.0	0.0	20.0	60.0
21	Karo	0.0	20.0	0.0	40.0	40.0
22	Padanglawas Utara	40.0	40.0	0.0	0.0	20.0
23	Tapanuli Utara	40.0	0.0	20.0	0.0	40.0
	Sumatera Utara	3.9	17.4	24.3	34.1	20.4

Secara umum rata-rata konsumsi energi anggota rumah tangga miskin di Sumatera Utara maupun kabupaten/kota lebih rendah dari kebutuhan kalori yang dianjurkan (Tabel 5). Tingkat konsumsi energi anggota rumah tangga miskin di Sumatera Utara rata-rata sebesar 1998 kalori per orang per hari (0.36 kali kebutuhan yang dianjurkan) hingga 3484 kalori per orang per hari (3.47 kali kebutuhan kalori yang dianjurkan). Rata-rata tingkat konsumsi energi anggota rumah tangga miskin terendah terdapat di Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara berturut-turut 927, 927 dan 927 atau sekitar 0.36 kali kebutuhan kalori yang dianjurkan) dan tertinggi di Binjai (7628 kalori per orang per hari, 3.47 kali kebutuhan kalori yang dianjurkan).

Pada Tabel 5. tertera sebaran rumah tangga miskin kabupaten/ kota dan Sumatera Utara menurut angka kecukupan energi, dikategorikan atas *defisit tingkat berat atau sangat rawan pangan* (angka kecukupan energi < 70%), *defisit tingkat sedang atau rawan pangan* (angka kecukupan energi 70-79%), *defisit tingkat ringan* (angka kecukupan energi 80 - 89%), *normal* (angka kecukupan energi 90 – 119%) dan *lebih* (angka kecukupan energi > 120%). Tampak bahwa ada rumah tangga Sumatera Utara maupun kabupaten/kota yang angka kecukupan konsumsi energinya pada kategori lebih. Berdasarkan kategori angka kecukupan energinya, rumah tangga miskin di Sumatera Utara tergolong sangat rawan pangan sebesar 3.9%, rawan pangan sebesar 17.4%, normal sebesar 58.4% dan lebih sebesar 20.4%.

Persentase rumah tangga miskin sangat rawan dan rawan pangan label 5 sebanding dengan anggota rumah tangga miskin yang tergolong bergizi buruk yakni 21.3% pada Tabel 4. Demikian juga persentase rumah tangga miskin yang mengalami defisit energi pada Tabel 5 (44.6%)

PENUTUP

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan pada survey ini disimpulkan bahwa :

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

1. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara fluktuatif dari tahun ketahun. Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin menjadi 1.360.329 jiwa atau 9.76% dari penduduk Sumatera Utara dan tahun 2009 sebanyak 1.474.260 jiwa atau 11.13% dari penduduk Sumatera Utara.
2. Penduduk miskin menyebar tidak merata, sebagian besar (63.59%) berada hanya di 9 Kabupaten/kota yakni Medan, Langkat, Asahan, Labuhan Batu, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Nias dan Nias Selatan, dan sisanya (44.57%) di 24 kabupaten/kota lainnya.
3. Lama pendidikan penduduk miskin Sumatera Utara tahun 2016 tergolong rendah, rata-rata 7.1 tahun. Sebagian besar diantaranya (17.9%) berpendidikan 0-6 tahun, 34.2% berpendidikan 7-9 tahun, 9.4% berpendidikan 10-12 tahun, 26.2% berpendidikan lebih dari 12 tahun.
4. Setiap penduduk miskin Sumatera Utara yang berpenghasilan rata-rata menanggung 2.8 orang (termasuk dirinya sendiri).
5. Sebagian besar penduduk miskin yang memiliki penghasilan bekerja di sektor pertanian (petani, nelayan, buruhtani, dan buruh pertanian), kecuali di Simalungun dan Tanjung Balai bekerja di sektor wiraswasta, karyawan, atau buruh.
6. Ukuran rumah tangga miskin di Sumatera Utara beranggota rata-rata 4 jiwa. Persentase jumlah rumah tangga miskin berukuran kecil (beranggota \leq 4 jiwa) sebanding dengan yang berukuran sedang dan besar (beranggota \geq 5 jiwa).
7. Sebagian besar (68.7%) kepala rumah tangga miskin di Sumatera Utara bekerja di sektor pertanian (petani, nelayan, buruh tani, dan buruh pertanian), sisanya 29.0% berkerja sebagai buruh, karyawan, wiraswasta, dan lain-lain, serta 2.9% tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan.
8. Berdasarkan kategori angka kecukupan energinya, rumah tangga miskin di Sumatera Utara tergolong sangat rawan pangan sebesar 1.4%, rawan pangan sebesar 18.7%, normal sebesar 25.4%, dan lebih sebesar 20.1%.

REFERENCES

- Arbaiyah, I., 2013. Hubungan Pola Konsumsi Pangan Dan Ketersediaan Pangan Dan Status Gizi Keluarga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Tahun 2013. Tesis. Universitas Sumatera Utara, Medan
- Alridiwersah, A., Alqamari, M., Cemda, A. R., Siregar, M. S., & Lubis, S. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCA COVID 19 MELALUI BUDIDAYA JAMUR TIRAM. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4), 1254-1259.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

- Handayani, M., Sayekti, W.D., Ismono, R.H., 2019. Pola konsumsi pangan rumah tangga pada desa pelaksana dan bukan pelaksana Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Ilmu-ilmu Agribisnis* 7, 113- 119.
- Badan Ketahanan Pangan, 2015. Panduan Perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH). Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Imelda, 2018. Karakteristik dan Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Masyarakat Kota Pontianak. *ETHOS: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 6, 250–259. doi: 10.29313/ethos.v6i2.3441.
- Rimbawati, R., Siregar, Z., & Yusri, M. (2021). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Pematang Johar Melalui Usaha Batik Sawah. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 934-943.
- Siregar, A. F., Salsabila, S., & Alqamari, M. (2022). ANALISIS RESPON PENAWARAN DAGING SAPI POTONG DI PASAR SIBUHUAN, KABUPATEN PADANG LAWAS, PROVINSI SUMATERA UTARA. *JURNAL AGROTEKNOSAINS*, 6(1), 1-10.